

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Gerakan Pemuda Ansor

Sejarah kelahiran GP Ansor dalam organisasi kelompok NU telah melalui proses panjang. GP Ansor berawal dari sebuah organisasi kepemudaan bernama Nahdlatusy Syubban, berdiri pada tahun 1930 sebagai hasil peleburan dari tiga organisasi kepemudaan yang sudah ada sebelumnya, Syubbanul Wathon, Ahlul Wathon dan Da'watusy Syubban. Lahir dari situasi krisis kolonialisme Belanda, ketiga organisasi ini memiliki misi yang sama yaitu bekerja mengorganisir kaum muda, memperbaharui kecintaan mereka pada tanah air dan menumbuhkan kesadaran dalam diri mereka akan pentingnya lepas dari penjajahan. Ketiganya tetap melantunkan mars yang sama, Ya Lal Wathon atau Syubbanul Wathon, lagu-lagu berbahasa Arab tentang nasionalisme dan pentingnya melawan penjajahan¹.

Nahdlatusy Syubban berubah nama menjadi Persatuan Pemuda NU (PPNU) pada tahun 1931. Pada tahun 1934, PPNU berganti nama menjadi Ansor Nahdlatul Ulama. Nama Ansor merupakan saran dan pemberian dari KH. Abdul Wahab Chasbullah, guru para pemuda NU saat itu².

GP Ansor dilahirkan oleh tokoh-tokoh sentral NU dari situasi “konflik” internal dan tuntutan kebutuhan alamiah. Berawal dari perbedaan antara tokoh tradisional dan tokoh modernis yang muncul di tubuh Nahdlatul Wathan, organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan Islam, pembinaan mubaligh, dan pembinaan kader. K.H. Abdul Wahab Chasbullah, tokoh tradisional dan K.H. Mas Mansyur yang berhaluan modernis, akhirnya menempuh arus gerakan yang berbeda justru saat tengah tumbuhnya semangat untuk mendirikan organisasi kepemudaan Islam. Dua tahun setelah perpecahan itu, pada 1924 para pemuda yang mendukung K.H. Abdul Wahab yang kemudian menjadi pendiri NU membentuk wadah dengan nama Syubbanul Wathan (Pemuda Tanah Air). Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Gerakan Pemuda Ansor setelah sebelumnya mengalami

¹ Setiawan, “Sejarah Lahirnya Gerakan Pemuda Ansor Pada Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama,” 7.

² Zudi Setiawan, “Sejarah Lahirnya Gerakan Pemuda Ansor Pada Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama,” 7.

perubahan nama seperti Persatuan Pemuda NU (PPNU), Pemuda NU (PNU), dan Ansor Nahdlatol Ulama (ANO)³.

Pada Mukhtamar NU kesembilan ini Ansor Nahdlatol Ulama (ANO, kelak menjadi Gerakan Pemuda Ansor / GP Ansor) diterima dan disahkan sebagai bagian (departemen) pemuda NU dengan pengurus antara lain: Ketua H.M. Thohir Bakri; Wakil Ketua Abdullah Ubaid; Sekretaris H. Achmad Barawi dan Abdus Salam. Oleh karena itu, keberadaan GP Ansor tidak terlepas dan menjadi bagian integral NU sebagai salah satu Badan Otonom (Banom) yang memiliki tugas untuk mengorganisasikan kaum muda NU. Tanggal 10 Muharram 1353 H atau 24 April 1934 yang menjadi hari diambilnya keputusan tentang disahkannya ANO menjadi bagian dari NU inilah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Lahir Gerakan Pemuda Ansor⁴.

Gerakan Pemuda Ansor merupakan salah satu organisasi kepemudaan yang perannya dalam membangun karakter pemuda semakin lemah, hal itu karena organisasi tersebut memiliki permasalahan internal. Sifat keorganisasian yang melekat di tubuh Gerakan Pemuda Ansor yaitu mengemban urusan kepemudaan, keagamaan, kebangsaan, dan kerakyatan, menggambarkan bahwa permasalahan yang dihadapi organisasi tersebut sangat kompleks. Gerakan Pemuda (GP) Ansor merupakan salah satu wadah pemuda dalam menjaga Nahdlatul Ulama. Organisasinya adalah Ansor. Organisasi yang berumur 25 tahun sampai 40 tahun. GP Ansor terdiri dari hirarki pusat (Pimpinan Pusat), Provinsi (Pimpinan Wilayah), Kabupaten (Pimpinan Cabang), Kecamatan (Pimpinan Anak Cabang), dan tingkat Desa (Pimpinan Ranting)⁵.

2. Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Jepara

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Jepara berfokus pada beberapa program yang salah satunya pengkaderan, ngaji kebangsaan, pemberdayaan ekonomi, dan lain-lain. PC GP Ansor Jepara ini menjadi sarana kegiatan positif untuk para pemuda di

³ Zudi Setiawan, "Sejarah Lahirnya Gerakan Pemuda Ansor Pada Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama," 8.

⁴ Zudi Setiawan, "Sejarah Lahirnya Gerakan Pemuda Ansor Pada Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama," 11–12.

⁵ Pipit - Widiatmaka, "Peran Organisasi Kepemudaan Dalam Membangun Karakter Pemuda Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Pemuda (Studi Pada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah)," *Jurnal Ketahanan Nasional* 22, no. 2 (2016): 182, <https://doi.org/10.22146/jkn.12002>.

Jejara dengan melakukan kegiatan rutin. Seperti yang dijelaskan oleh ketua PC GP Ansor Jepara, yaitu:

“Melakukan kegiatan PKD, Diklatsar yang dilakukan setiap bulan ke kecamatan-kecamatan. Sedangkan ditingkat kabupaten ada PKL yang dilakukan setiap tahun yang pengkaderannya berjenjang. Selanjutnya, rutin ngaji dilakukan di setiap ranting yang dilakukan di mushola atau masjid. Rutin ngaji ini beragam, misalnya ngaji kitab kuning. Sedangkan di kabupaten rutin ngajinya berpindah-pindah kecamatan, namun yang dibahas dalam rutin ini termasuk ada wawasan kebangsaan karena ini menjadi penting, karena masih beranggapan bahwa memahami kebangsaan itu menjadi hal yang perlu didorong pada kader-kader NU bahwa beragama dan bernegara tidak ada yang bertentangan. Kegiatan lainnya yaitu halaqoh di Jepara, mengevaluasi kinerja bupati.”⁶

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Jepara sudah berdiri sekitar 1950-an. Dari hasil penelitian, diperoleh data ketua PC GP Ansor Jepara yang sebelumnya yang diperoleh peneliti, yaitu Mbah Abdul Latif, Imron Rosyadi, bapak Sholikin, bapak Mustaqim Umar masa khidmat 2004-2008, bapak H. Ahmad Ja'far dengan masa khidmat 2008-2012, bapak Ahmad Kholil dengan masa khidmat 2012-2017, bapak H. Syamsul Anwar dengan masa Khidmat 2017-2021, dan bapak Ainul Mahfudh, S.E. dengan masa khidmat 2021-2025. Di kabupaten Jepara terdapat 16 kepengurusan pada tingkat Pimpinan Anak Cabang (PAC) yang tersebar di kecamatan yang ada di kabupaten Jepara. Untuk kepengurusan tingkat ranting terdapat 230 ranting yang tersebar di 184 desa dan 11 kelurahan yang ada di kabupaten Jepara. Kantor PC GP Ansor Jepara berada di pusat kota Jepara yang bealamat di Gedung Nahdlatul Ulama Jepara, jalan Pemuda No. 51, Potroyudan IX, Potroyudan, Kec Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, 59412.⁷

Di bawah ni merupakan susunan pengurus Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Jepara masa khidmat 2021-2025, antara lain:

1) PENGURUS HARIAN

Ketua

: Ainul Mahfudh, S.E

⁶ Hasil wawancara dengan ketua PC GP Ansor Jepara, 2 Januari 2023.

⁷ Hasil wawancara dengan ketua PC GP Ansor Jepara, 2 Januari 2023.

- Wakil Ketua : Muhammad Syaful Kalim
 Wakil Ketua : Nur Rois
 Wakil Ketua : Muhammad Abdullah Badri
 Wakil Ketua : Muhammad Kholas Syihab
 Wakil Ketua : Lukman Hakim
 Wakil Ketua : Supriyanto
 Wakil Ketua : Ahmad Rifai
 Wakil Ketua : Muhammad Sirojudin Nur
 Wakil Ketua : Ahmad Saefudin
 Wakil Ketua : Abdullah Nur Rokhim
 Sekretaris : Muhammad Lukman Ihsanuddin
 Wakil Sekretaris : Ahmadun
 Wakil Sekretaris : Nurul Anam
 Wakil Sekretaris : Muhammad Ali Masrukhin
 Wakil Sekretaris : Ahmad Afandi
 Wakil Sekretaris : Muhammad Ishaq
 Wakil Sekretaris : Muhammad Abdurrahman
 Wakil Sekretaris : Sukarno
 Wakil Sekretaris : Muhammad Ahnafudin
 Wakil Sekretaris : Ahmed Roziq
 Wakil Sekretaris : Talchis Murtafi'
 Bendahara : Agus Riyanto
 Wakil Bendahara : M. Habli Mubarak
 Wakil Bendahara : Nurul Khoiruddin
 Wakil Bendahara : Zaenal Arifin
 Wakil Bendahara : Syaiful Anwar
- 2) DEWAN PENASEHAT
- Ketua : KH. Charis Rohman
 Wakil Ketua : Ahmad Ja'far, S.Ag
 Sekretaris : H. Syamsul Anwar, S.E
 Wakil Sekretaris : Haizul Ma'arif, S.H
 Anggota : a. Drs. H. Mustaqim Umar, M.M
 b. Drs. H. Sholikin, M.Si
 c. M. Kholil, S.Ag
- 3) DEWAN INSTRUKTUR
- Ketua : Kusdiyanto, M.Pd
 Sekretaris : Asyhadi, S.Pd.I
 Anggota : a. Muhammad Jauharuddin, S.Sos.I
 b. Ahmad Zaenudin, S.H.I
 c. Fatkhur Rohman, S.E
 d. Harun Salim, S.E

3. Visi, Misi, & Tujuan Gerakan Pemuda Ansor

a. Visi

Visi Gerakan Pemuda Ansor, antara lain:

1. Revitalisasi Nilai dan Tradisi
2. Penguatan Sistem Kaderisasi
3. Pemberdayaan Potensi Kader
4. Kemandirian Organisasi

b. Misi

Misi gerakan Pemuda Ansor, antara lain:

1. Internalisasi Nilai ASWAJA dan Sifat Rasul dalam Gerakan Pemuda Ansor.
2. Membangun Disiplin Organisasi dan Kaderisasi berbasis Profesi.
3. Menjadi sentrum lalu lintas informasi dan peluang usaha antar kader dengan stakeholder.
4. Mempercepat kemandirian ekonomi kader dan organisasi.

c. Tujuan

Adapun tujuan dari Gerakan Pemuda Ansor, antara lain:

1. Membentuk dan mengembangkan generasi muda Indonesia sebagai kader bangsa yang cerdas dan tangguh, memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, berkepribadian luhur, berakhlak mulia, sehat, terampil, patriotik, ikhlas dan beramal shalih.
2. Menegakkan ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah dengan menempuh manhaj salah satu madzhab empat di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Berperan secara aktif dan kritis dalam pembangunan nasional demi terwujudnya cita-cita kemerdekaan Indonesia yang berkeadilan, berkemakmuran, berkemanusiaan dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia yang diridhoi Allah SWT.

4. Program Kerja Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Jepara

Adapun program kerja Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Jepara, antara lain:

Tabel 4.1
Program kerja bidang politik hukum dan HAM

No	Program	Kegiatan
1.	Sosialisasi LBH PC GP ANSOR	- Roadshow sosialisasi LBH di PAC

2.	Legal Formal kelembagaan dan launching	Realisasi legal formal kelembagaan LBH PC GP ANSOR dan launching Pusat Studi Kebijakan Publik
3.	Pendidikan Hukum Bagi Kader ANSOR	- Sekolah Hukum - Pendidikan Paralegal bagi - Sekolah Jurnalisme Hukum - Hukum Zakat
4.	Edukasi dan Pendampingan Legalitas Aset warga NU di Jepara	- Pendataan - Penyuluhan - Pendidikan - Pendampingan - Kemitraan dengan Kemenag
5.	Advokasi Hukum bagi Warga NU	- Penyuluhan - Pendidikan - Pendampingan non litigasi - Pendampingan litigasi
6.	Kemitraan Pendampingan Hukum dengan Pemerintah Desa Sekabupaten Jepara	Realisasi Pendampingan Hukum dengan pemerintah Desa sekabupaten Jepara
7.	Pusat Layanan Aduan dan Konsultasi Hukum	- Melalui Media Sosial Facebook, IG, Twitter - Podcast
8.	Pendidikan Politik	- Sekolah Politik bagi Kader ANSOR - Sekolah Legislator
9.	Advokasi Kebijakan Publik	- Memberikan Catatan terhadap Peraturan Daerah
10.	Pendampingan Hukum Bagi Warga Tidak Mampu	- Dengan Kemenkumham

Tabel 4.2

Program kerja bidang advokasi & pemberdayaan masyarakat

No	Program	Kegiatan
1.	Konsolidasi Bidang Advokasi	- Kopdar Bidang Advokasi se-Jepara
2.	Pendidikan Demokrasi	- Sekolah Pemilu
3.	Penguatan Kapasitas	- Sekolah Kader Penggerak

	dan distribusi Kader Ansor	Desa (SKPD) - Seminar Refleksi UU Desa - Pemetaan Kader dalam Ruang Publik
4.	Sinergitas dengan Lembaga Eksternal	- Kemitraan dengan Dinsospemades - Bekerjasama dengan PAPDESI (Paguyuban Pamong Desa Seluruh Indonesia)

Tabel 4.3
Program kerja bidang aparatur organisasi

No	Program	Kegiatan
1.	Pelaksanaan Akreditasi Organisasi	- Sosialisasi Akreditasi Untuk PAC Se Kab Jepara - Akreditasi PAC Se-Jepara
2.	Penataan Administrasi Organisasi	- Sosialisasi PO terbaru hasil Konbes Minahasa - Mendampingi Kegiatan Konferencab dan Konferensi Ranting (istilah baru dlm PO minahasa) - Penataan SK PAC dan Ranting Se Kab. Jepara - Pelatihan Sidang Konferensi Di PAC Untuk Ranting - Pelatihan Administrasi Sesuai PD/PRT - Melengkapi Atribut Organisasi Dan Menyeragamkan Sesuai PO Minahasa - Menerbitkan Buku Saku PD PRT Dan PO Ansor Dibagikan Ke PAC Dan Ranting
3.	Basis Data Kader dan Alumni	- Penyusunan Data Base Alumni Dan Kader ANSOR Se Kabupaten.

Tabel 4.4
Program kerja bidang media & komunikasi publik

No	Program	Kegiatan
1.	Optimalisasi Pengelolaan Media Digital	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Website Ansorjepara.or.id - Pengelolaan Media Sosial Instagram dan Facebook @pcansorjepara - Pengelolaan Youtube Channel Ansor Jepara
2.	Nawa Cita Media dan Komunikasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Inventarisasi akun media melalui google form (PC membuat instrumen standar) - Membuat template sederhana release kegiatan - Produksi quote inspiratif dari kiai lokal dan kitab kuning - Produksi Podcast sederhana - Template desain (logo apa saja yang harus ada? Buat semacam SOP) - Modul literasi digital dan kaderisasi. - Sekolah / Madrasah literasi digital, media, dan jurnalistik - Festival / lomba yang berkaitan dengan media misalnya: lomba quote, video - Kerja sama dengan media partner dan pembentukan calon tim cyber army melalui kajian periodik tentang literasi media

Tabel 4.5
Program kerja bidang iptek & kajian strategis

No	Program	Kegiatan
1.	Pengembangan Bidang IT	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Website Ansorjepara.or.id - Rebuild Aplikasi Android Ansor Jepara - Pembuatan Sistem untuk Akreditasi Pimpinan Ranting

		<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan Google Drive untuk Keperluan Organisasi - Pengembangan Big Data Organisasi
2.	Pengembangan SDM Kader	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Website bekerjasama dengan Pihak ke eksternal - Penyusunan Buku Tutorial untuk pengelolaan dan pemanfaatan IT bagi ranting
3.	Kajian Strategis	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan kajian dan riset strategis dalam Ilmu pengetahuan dan Teknologi

Tabel 4.6
Program kerja bidang ekonomi dan industri kreatif

No	Program	Kegiatan
1.	Penguatan Kordinasi dengan Lembaga Ekonomi Ansor Jepara	<ul style="list-style-type: none"> - Pendataan Asset Milik Ansor Jepara (Tanah, Bangunan, Usaha Milik Ansor) - Memastikan Legalitas Usaha Milik Ansor yang sudah Berjalan - Membantu perkembangan dan sinerginatas dengan BMT Aman utama - Mengawal Arisan Ansor sebagai sumber ekonomi
2.	Kerja sama Ekonomi dengan Pihak Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> - Bekerjasama dengan Agen Gas untuk mendapatkan Pangkalan guna Didistribusikan kepada PAC Se Jepara - Bekerjasama dengan Atlantis ISP untuk pemenuhan Internet Desa dan Pengembangan Usaha Organisasi - Menindaklanjuti Kerjasama yang telah di lakukan PP kepada BUMN yang di peruntukkan untuk Cabang seperti Kerjasama dengan POS

		indonesia dan Pertamina dalam pendirian Pertashop - Menjalin Kerjasama dengan Dinas-dinas Terkait
3.	Peningkatan Kapasitas Kader	- Mengadakan pelatihan kewirausahaan (skil wirausaha) melalui madrasah/sekolah ekonomi dan digitalisasi pemasaran

Tabel 4.7

Program kerja bidang pengkaderan

No	Program	Kegiatan
1.	Pendidikan dan Kaderisasi	- Menjadwalkan dan Mengawal Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Dasar (PKD) di seluruh PAC Se Jepara - Melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Lanjut (PKL) untuk kader Jepara
2.	Pengembangan SDM Kader	- Mengirimkan dan Meperbanyak Instruktur Untuk kebutuha Pengkaderan - Memberdayakan Lulusan PKL untuk turut serta mengawal PKD - Melakukan Evaluasi Hasil lulusan PKD di kabupaten Jepara

Tabel 4.8

Program kerja bidang olah raga & seni budaya

No	Program	Kegiatan
1.	Olah Raga Kader	- Menjadwalkan pelaksanaan Ansor Jepara Cup untuk kompetisi Kader - Membuat Event Olah raga Berkala - Pendataan Atlit Kader - Bekerjasama Dengan KONI dan Dinas Pendidikan Jepara

2.	Seni dan Budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat Perunjukan Kearifan Lokal dan Budaya Lokal - Bekrejasama dengan Dinas Pariwisata dan Dewan Kesenian Daerah Jepara Melakukan Pendataan Budaya Lokal Jepara untuk di lestarikan Kembali
----	-----------------	--

Tabel 4.9
Program kerja majlis dzikir & sholawat rijalul Ansor

No	Program	Kegiatan
1.	Kaderisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Dirosah Ula - Dirosah Wustho
2.	Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> - Dauroh Aswaja - Da'i Muda Aswaja - Muloroso Mayit - Manajemen Masjid dan Mushalla
3.	Seminar	<ul style="list-style-type: none"> - Seminar Pemikiran Ulama NU - Seminar Harakah An-Nahdliyyah - Deteksi Dini Paham Radikalisme
4.	Workshop	<ul style="list-style-type: none"> - Bedah Kitab Aswaja
5.	Dzikir & Sholawat	<ul style="list-style-type: none"> - Ijazah Manaqib - Safari Kultim - Tanbihul Ulama' - Nuzurul Qur'an - Rihlah Rijalul Ansor
6.	Pembuatan Buku/Karya	<ul style="list-style-type: none"> - Transliterasi Turots - Buku Kebangsaan

B. Hasil Penelitian

1. Data Implementasi Pendidikan Politik Gerakan Pemuda Ansor Jepara Dalam Pengawasan Partisipatif di Pemilu 2024

Dalam penjabaran terkait dengan pendidikan politik Gerakan Pemuda Ansor Jepara dalam pengawasan partisipatif di Pemilu 2024, Pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Jepara

memiliki program dalam melibatkan kader-kader Ansor di pemilu, yaitu:

“Dari program struktural mempunyai sekolah demokrasi yaitu memberikan sejenis seminar untuk memberikan pengetahuan kepada kader-kader tentang demokrasi. Tujuannya untuk mensukseskan pemilu 2024, tapi program-program yang ke bawah tingkatan ranting yang nanti dilakukan disetiap tiga kecamatan namanya sekolah kader penggerak desa. Sekolah kader penggerak desa itu sejenis diklat satu hari pagi sampai malam yang materinya salah satunya tentang tentang demokrasi yang mengampu KPU dan Bawaslu. Selain itu, juga ada materi lain tentang materi pengawalan desa APBDes.”⁸

Dari penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa pendidikan politik Gerakan pemuda Ansor Jepara dalam pengawasan partisipatif ada dua, yaitu sekolah demokrasi dan sekolah kader penggerak desa.

Selanjutnya, peneliti juga memperoleh informasi bahwa Bawaslu Jepara memberikan sosialisasi kepada PC GP Ansor Jepara mengenai pemilu, yaitu:

“Sosialisasinya yaitu Bawaslu mengajak organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan termasuk Ansor untuk turut serta mensukseskan pemilu. Salah satunya turut serta menjadi pengawas partisipatif. Pihak Bawaslu mempertimbangkan itu karena struktur Ansor yang begitu pesat dan Ansor memiliki 16 kepengurusan di kecamatan, mempunyai 230 ranting di seluruh desa/kelurahan di kabupaten Jepara. Pihak Bawaslu mengajak untuk bertemu, bekerjasama. Ketika ada kegiatan yang melibatkan ormas Ansor di undang. Bawaslu juga menjadi pemateri di acara-acara Ansor. Bawaslu menggandeng Ansor karena memang sosialisasi pengawasan partisipatif agar masyarakat mengetahui bahwa pemilu itu tidak hanya tanggungjawab penyelenggara tetapi peran serta masyarakat menjadi kunci termasuk Ansor.”⁹

Penjabaran mengenai program GP Ansor Jepara, peneliti juga menemukan program pengawasan partisipatif yang diwujudkan oleh Bawaslu Jepara melalui organisasi kepemudaan

⁸ Hasil wawancara dengan ketua PC GP Ansor Jepara, 2 Januari 2023.

⁹ Hasil wawancara dengan ketua PC GP Ansor Jepara, 2 Januari 2023.

seperti GP Ansor saat wawancara dengan ketua Bawaslu Jepara, yaitu:

“Perwujudannya yang dilakukan selama ini dengan memberikan pendidikan kepada mereka soal cara mengawasi seperti apa dengan melalui pendidikan pengawasan partisipatif. Tidak hanya Ansor saja, seluruh elemen OKP kita libatkan untuk memberikan binaan atau memberikan materi tentang pengawasan partisipatif. Soal implementasi di lapangan kita sesuaikan dengan komunitas masing-masing.”¹⁰

Kemudian, peneliti mendapatkan informasi dari ketua Bawaslu Jepara mengenai mewujudkan pelaksanaan pemilu yang bersih dan bermartabat melalui sosialisasi dan pengawasan partisipatif melalui organisasi kepemudaan, yaitu:

“Bawaslu sampai dengan hari ini melakukan bagian ikhtiar. Apapun proses yang dilakukan bawaslu untuk memberikan pendidikan dan pemahaman kepada masyarakat itu bagian dari ikhtiar. Soal output hasilnya tergantung masyarakat dan hari ini belum bisa melihat outputnya. Kalau output di 2019, yang ditargetkan belum bisa 100% terpenuhi, karena masyarakat belum bisa sepenuhnya memberikan dukungan sepenuhnya kepada bawaslu beserta melakukan pengawasan partisipatif.”¹¹

Sebagai penyelenggara pengawas pemilu, bawaslu Jepara memberikan sosialisasi kepada organisasi kemasyarakatan di wilayah kabupaten Jepara termasuk GP Ansor dengan memberikan binaan atau materi dan hasil di lapangan tergantung organisasi kemasyarakatan ini melaksanakannya.

Dari hasil penelitian, ketua PC GP Ansor Jepara mendorong agar SKPP (Sekolah Kader Pengawas Partisipatif) sampai tingkat bawah, yaitu:

“Pihak Ansor ini sebenarnya mendorong pendidikan SKPP di Bawaslu tingkatannya sampai ke bawah karena saat ini hanya sampai tingkat kabupaten. Jika SKPP bisa turun sampai kecamatan bisa mengkonsolidir kader-kader untuk diberikan materi tentang pengawasan partisipatif. Tujuan utama dari pendidikan ini mentransfer ilmu kepada kader, kemudian jika kader sudah mengetahui mereka akan bergerak sesuai bangunan pikirannya.”¹²

¹⁰ Hasil wawancara dengan ketua Bawaslu Jepara, 16 Januari 2023.

¹¹ Hasil wawancara dengan ketua PC GP Ansor Jepara, 2 Januari 2023.

¹² Hasil wawancara dengan ketua PC GP Ansor Jepara, 2 Januari 2023.

Penjabaran tentang keterlibatan Gerakan Pemuda Ansor Jepara dalam pengawasan partisipatif di pemilu 2024, yaitu:

“Kalau secara non formal PC GP Ansor Jepara mendorong seluruh kader untuk terlibat dalam proses gelaran pemilu, apabila kader siap jadi penyelenggara pemilu pihaknya siap untuk mendorong agar menjadi penyelenggara, jika ada yang siap jadi caleg siap untuk didorong agar jadi caleg.

Kalau yang pengawasan partisipatif mendorong kader-kader untuk terlibat karena pemilu itu tidak cukup hanya diserahkan kepada penyelenggara pemilu, butuh peran serta masyarakat. Untuk itu mendorong kader-kader untuk mengajak masyarakat agar ikut serta datang ke TPS. Minimal kader-kader mengajak, mensosialisasi bahwa pemilu itu gawe-gawe negara yang sah untuk mengganti pemerintahan yang baru. Kalau belajar tentang pengawasan partisipatif adanya di sekolah kader penggerak desa.”¹³

Selanjutnya, peneliti juga menggali informasi mengenai kader GP Ansor yang ikut berpartisipasi di pemilu, yaitu:

“Jadi, kader GP Ansor Jepara itu banyak, ada yang memposisikan diri menjadi penyelenggara pemilu. Dari beberapa kader mencalonkan diri menjadi penyelenggara pemilu ada dari tingkat kabupaten, Kecamatan, dan desa. Ada yang konsentrasi di partai tertentu (Caleg). Tujuannya mensukseskan pemilu, meskipun untuk mensukseskan dirinya, sebenarnya mereka yang terlibat digelaran pemilu itu memiliki peranan mensukseskan pemilu. Karena pemilu dikatakan sukses atau tidak itu harus kondusif, tingkat partisipasinya meningkat. Selanjutnya ada kader yang ada di JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat), ini belum diketahui masuk atau tidaknya. koordinator di JPPR ini dari kader Ansor yaitu wakil ketua PC GP Ansor Jepara. JPPR itu menjadi Lembaga pemantau pemilu agar pemilu berjalan dengan baik. Di Indonesia ada JPPR internasional, di provinsi juga ada, dan di kabupaten ada 9 orang dan 4 orang dari 9 itu adalah kader Ansor Jepara, termasuk koordinatornya adalah Lukman hakim wakil ketua PC GP Ansor Jepara.”¹⁴

Sementara itu, peneliti mendapatkan penjabaran informasi oleh ketua PC GP Ansor Jepara mengenai peran dan partisipasi GP

¹³ Hasil wawancara dengan ketua PC GP Ansor Jepara, 2 Januari 2023.

¹⁴ Hasil wawancara dengan ketua PC GP Ansor Jepara, 2 Januari 2023.

Ansor Jepara untuk memberikan kontribusi dan sumbangan dalam perbaikan pelaksanaan pemilu, yaitu:

“GP Ansor Jepara dalam hal ini partisipasi dan perannya dalam pelaksanaan pemilu tentu mendorong seluruh kader-kader agar ikutserta dalam menjadi penyelenggara pemilu di semua tingkatan, baik tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, bahkan ditingkat desa, bahkan bisa jadi di tingkat TPS. Jadi, kami menginstruksikan agar kader Ansor yang tertarik menjadi penyelenggara untuk ikutserta menjadi penyelenggara pemilu. Harapannya di dalam mereka melaksanakan tugas penyelenggaraan ini juga turut serta melakukan perbaikan pelaksanaan pemilu. Selanjutnya, kami juga memberikan pendidikan pemilu kepada kader-kader kita ditingkatan kecamatan dan desa, kalau di Ansor itu koordinator wilayah atau korwil. Pendidikan pemilu atau demokrasi yang dilakukan Ansor ke kader-kader itu bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu, jadi narasumbernya itu dari KPU dan Bawaslu, pesertanya dari kader-kader Ansor. Harapannya kader-kader kita bisa memiliki ilmu pengetahuan tentang kepemiluan, sehingga bisa ditularkan kepada masyarakat sekitar mereka.”¹⁵

Peneliti memperoleh informasi bahwa Bawaslu Jepara dan PC GP Ansor Jepara melakukan kerjasama mengenai pengawasan partisipatif. Berdasarkan informasi dari ketua Bawaslu Jepara mengenai sosialisasi dari Bawaslu Jepara ke organisasi kepemudaan seperti GP Ansor Jepara tentang peran dan partisipasi ormas, yaitu:

“Secara umum, bawaslu kerjasama dengan GP Ansor karena berbasisnya komunitas/ormas. Bawaslu di ormas itu bekerjasama dengan dua Lembaga, yaitu bawaslu dengan NU (GP Ansor) dan bawaslu dengan Muhammadiyah (Pemuda Muhammadiyah). Soal keterlibatan teman-teman Ansor dalam melakukan pengawasan partisipatif mereka memberi intruksi pada jajarannya untuk ikutserta berperan aktif dalam pengawasan itu. Tetapi tidak semua Ansor bisa menjadi pengawas partisipatif karena lembaga Ansor bisa jadi kadernya menjadi peserta pemilu, bisa jadi kadernya menjadi penyelenggara pemilu. Diluar itu, Ansor selaku organisasi kepemudaan yang berbasis ormas punya kewajiban yang sama untuk ikut serta mensukseskan pemilu

¹⁵ Hasil wawancara dengan ketua PC GP Ansor Jepara, 2 Januari 2023.

dengan melalui pengawasan partisipatif. Untuk kerjasamanya dengan bawaslu ada MOU perannya Ansor seperti apa, perannya bawaslu seperti apa, dan itu semua ada di MOUnya bawaslu dan Ansor.”¹⁶

Peneliti juga memperoleh informasi mengenai bagaimana GP Ansor Jepara dalam mewujudkan program pengawasan partisipatif di wilayah kabupaten Jepara, yaitu:

“Pada prinsipnya, kita sebagai Gerakan pemuda ini sudah menyampaikan kepada kader agar kader-kader ini menjadi pengawas partisipatif. Bagi kader yang tidak menjadi penyelenggara pemilu, yang tidak menjadi peserta pemilu ini diharapkan menjadi pengawas partisipatif dengan cara sering koordinasi dengan penyelenggara pemilu ketika ada problem atau masalah di kepemiluan bisa dilaporkan. Ya minimal kita melakukan koordinasi dengan penyelenggara pemilu yang berasal dari kader-kader Ansor.”¹⁷

Selain adanya kegiatan sekolah demokrasi dan sekolah kader penggerak desa, GP Ansor Jepara mendorong kader-kadernya dari tingkatan bawah/ranting untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Kader GP Ansor juga ada yang menjadi anggota di JPPR.

2. Data Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Pendidikan Politik Gerakan Pemuda Ansor Jepara Dalam Pengawasan Partisipatif Di Pemilu 2024

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti tentang faktor pendukung dari GP Ansor Jepara mengenai pendidikan politik dalam pengawasan partisipatif di pemilu, yaitu;

“Yang pertama, Kader Ansor banyak yang mempunyai struktur kader yang sampai ke ranting sehingga kebutuhan sumber daya manusianya banyak. Kedua, Struktur organisasinya sampai desa, sehingga Ketika Kerjasama dengan Bawaslu mudah dilaksanakan karena hampir desa di kabupaten Jepara ada pengurus Ansor. Dan ketiga, meskipun latar belakang kader Ansor berbeda-beda, tetapi banyak kader-kader yang mumpuni, misalnya dosen, jadi advokat, dan lain-lain.”¹⁸

¹⁶ Hasil wawancara dengan ketua Bawaslu Jepara, 16 Januari 2023.

¹⁷ Hasil wawancara dengan ketua PC GP Ansor Jepara, 2 Januari 2023.

¹⁸ Hasil wawancara dengan ketua PC GP Ansor Jepara, 2 Januari 2023.

Kemudian, peneliti memperoleh informasi faktor pendukung GP Ansor Jepara dan Bawaslu Jepara dalam melakukan Kerjasama mengenai pengawasan partisipatif, yaitu:

“Pertama, komunikasi dengan bawaslu sangat bagus, dibuktikan dengan adanya perjanjian kerjasama dengan kesepakatan MOU. Dan yang kedua, jika diminta mengisi tentang pengawasan partisipatif materi pihak Ansor selalu hadir, dan pihak Bawaslu juga sebaliknya.”¹⁹

Selanjutnya, peneliti menggali informasi faktor penghambat dari GP Ansor Jepara mengenai pendidikan politik dalam pengawasan partisipatif di pemilu, yaitu;

“Pertama, selama ini kader-kader Ansor kosentrasi di sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Banyak dari kader yang belum memahami tentang konsep pengawasan partisipatif. Maka perlu intensitas peningkatan pengetahuan para kader, yang sederhananya perlu transformasi ilmu pengetahuan dari Bawaslu. Agar kader-kader paham gawe-gawe pemilu tidak hanya tanggungjawab Bawaslu. Kedua, tidak samanya bangunan atau pikiran kader Ansor. Kader-kader Ansor ini dari bermacam kalangan karena organisasi ini multi anggota yang kadernya terdiri dari kalangan dari pesantren, SMA, tidak sekolah, dan punya pekerjaan yang menyebabkan transformasi ilmu pengetahuan tidak sama. Dan ketiga, sumber daya manusianya harus lebih ditingkatkan dari kadernya.”²⁰

Peneliti juga memperoleh informasi tentang faktor penghambat GP Ansor Jepara dan Bawaslu Jepara dalam melakukan Kerjasama mengenai pengawasan partisipatif, yaitu:

“Pelaksanaan sosialisasi dari Bawaslu ke Ansor harus menyesuaikan waktu, karena program pengawasan partisipatif salah satu program Ansor agar tidak terjadi tumpang tindih dengan program Ansor yang lain.”²¹

C. Pembahasan

1. Analisis Implementasi Pendidikan Politik Gerakan Pemuda Ansor Dalam Pengawasan Partisipatif Di Pemilu 2024

Pendidikan politik merupakan kegiatan pendidikan yang bertujuan dan sistematis yang mengarahkan individu ke dalam proses pembelajaran untuk berpartisipasi dalam kehidupan

¹⁹ Hasil wawancara dengan ketua PC GP Ansor Jepara, 2 Januari 2023.

²⁰ Hasil wawancara dengan ketua PC GP Ansor Jepara, 2 Januari 2023.

²¹ Hasil wawancara dengan ketua PC GP Ansor Jepara, 2 Januari 2023.

politik²². Dasar utama pendidikan politik adalah Pancasila, UUD 1945 dan Sumpah Pemuda 1928. Pancasila dijadikan sebagai dasar utama pelaksanaan pendidikan politik karena Pancasila merupakan falsafah, pandangan hidup, dan dasar negara Indonesia, memberikan identitas nasional Indonesia. Bangsa Indonesia, khususnya generasi muda, harus menggali jati diri ini agar dapat mengenali dengan baik karakter, potensi kekuatan dan kelemahan diri sendiri, sehingga mampu mengatasi permasalahan dan tantangan global dalam kehidupan²³.

Salah satu cara menyelenggarakan pendidikan politik adalah melalui organisasi kepemudaan sebagai langkah pemberdayaan generasi muda. Ada banyak organisasi kepemudaan yang menyelenggarakan pendidikan politik, termasuk Gerakan Pemuda Amsor. GP Ansor adalah organisasi kepemudaan Islam yang berafiliasi dengan Nahdhatul Ulama. GP Ansor sebagai organisasi kepemudaan Islam yang berbakti kepada Pancasila penelitian ini dilakukan tepat untuk membentuk karakter kepemimpinan generasi muda lintas budaya, karena sebagai organisasi Islam perlu mewujudkan visi Islam yaitu rahmatan lil 'alamin (Rahmat alam) salah satunya membentuk pemimpin lintas budaya ini²⁴.

Peran yang dilakukan oleh PC GP Ansor Jepara adalah melakukan pendidikan politik terhadap kader-kader GP Ansor Jepara dari Pimpinan cabang sampai tingkat ranting. Pendidikan politik yang diberikan di GP Ansor Jepara salah satunya dengan pendidikan pengawasan partisipatif di pemilu²⁵. Pemilu merupakan perwujudan dari proses demokrasi. Pemilu yang baik, yang dilaksanakan menurut asas limpahan dan keadilan, akan menghasilkan pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang kredibel dan dapat diterima oleh masyarakat²⁶.

²² Payerli Pasaribu, "Peranan Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik," *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 5, no. 1 (2017): 54.

²³ Eko Handoyo and Puji Lestari, *Pendidikan Politik, Visipena Journal*, vol. 7 (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017), 13.

²⁴ Sanusi and Darmawan, "Implementasi Pendidikan Politik Dalam Membentuk Karakter Kepemimpinan Lintas Budaya Pada Generasi Muda Demi Mewujudkan Budaya Politik Pancasila (Studi Deskriptif Terhadap Organisasi Kepemudaan Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat)," 25.

²⁵ Hasil wawancara dengan ketua PC GP Ansor Jepara, 2 Januari 2024.

²⁶ Kadek Cahya Susila Wibawa, "Pengawasan Partisipatif Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 619–620.

Seiring berjalannya waktu, pemilu Indonesia yang dimulai pada tahun 1955 mengalami perkembangan yang cukup pesat jika dilihat dari perspektif pengawasan pemilu. Ketika pemilu pertama diadakan pada tahun 1955, istilah pemantauan pemilu tidak dikenal. Karena pada saat itu ada *trust* (kepercayaan) di antara seluruh peserta pemilu dan warga negara untuk menyelenggarakan pemilu, pada saat itu bertujuan untuk membentuk lembaga parlemen disebut Dewan Konstitusi²⁷.

Pada pemilihan umum 1982, pemantau pemilu baru muncul, dan namanya yaitu Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum, yang terbentuk dari ketidakpercayaan terhadap pemilihan yang diyakini diatur oleh kekuatan rezim yang berkuasa. Kemudian pada pemilu 1987, protes terhadap penyimpangan dan kecurangan pemilu semakin marak, sehingga pemerintah dan DPR yang saat itu didominasi oleh Golkar dan ABRI, meresponnya dengan menyempurnakan undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemilu. Pemilihan berikutnya, pemerintah juga telah membentuk badan baru untuk menangani pemilu sebagai afiliasi dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU)²⁸.

Pada abad sekarang, yaitu era reformasi, komplain kepada pemilu yang jujur dan adil semakin tinggi, dibuktikan tambah semakin kuatnya legal patokan pendirian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tingkat Pusat, tingkat Provinsi, kemudian Pembentukan Panitia Pengawasan Pemilu di babak Kabupaten/ Kota yang awalnya adhoc saja kisah diusulkan agar bekerja permanen²⁹.

Bawaslu tentu membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan pilimunya. Diharapkan pemilu dapat terselenggara secara lancar dan adil (langsung terbuka, bebas, rahasia, jujur dan adil) dan demokratis. Pemantauan partisipatif menjadi penting, terutama ketika mengawasi pemilu di ruang privat yang tidak terjangkau oleh pemantau pemilu. Selain itu, rakyat adalah pemilik kedaulatan tertinggi negara demokrasi ini.

Unsur masyarakat yang dapat dilibatkan dalam pemantauan dan pengawasan antara lain pemilih, peserta pemilu, lembaga pemantau pemilu, media massa, LSM, dan organisasi berbasis

²⁷ Solihah, Bainus, and Rosyidin, "Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Berintegritas Dan Demokratis," 15.

²⁸ Solihah, Bainus, and Rosyidin, 15.

²⁹ Gunawan Suswantoro, *Pengawasan Pemilu Partisipatif* (Penerbit Erlangga, 2016), 62.

masyarakat. UU Pemilu mengatur bahwatiga pihak yaitu, pemilih, lembaga pemantau pemilu, dan peserta pemilu, dapat menyampaikan laporan pelanggaran pemilu.

Pengawasan dalam pemilu ada program pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif merupakan bagian dari partisipasi rakyat termasuk para pemuda dalam pemilu. Ide pengawasan partisipatif muncul karena adanya kesadaran akan perlunya selalu membuka ruang bagi partisipasi rakyat dalam setiap proses politik di republik ini. Berdasarkan penjelasan dari ketua Bawaslu kabupaten Jepara, pengawasan partisipatif adalah keterlibatan partisipasi masyarakat di dalam melakukan pengawasan partisipatif. Disebut dengan pengawasan partisipatif yaitu semua elemen masyarakat. Pengawasan partisipatif tugasnya mengawasi, sebagaimana mengawasi proses pemilu. Adanya keterlibatan pengawasan partisipatif diharapkan meningkatkan produk demokrasi menjadi lebih baik.

Partisipasi dalam pemerintahan tidak berarti mencalonkan diri semata, khususnya partisipasi dalam pemilu. Dalam perspektif agama Islam itu harus hadir dalam menegakkan kebenaran dan keadilan serta menyelesaikan masalah yang ada di tengah masyarakat. Untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan kedamaian menuju kesejahteraan masyarakat itu berlandaskan agama itu sendiri. Islam mengajarkan umatnya untuk berpegang teguh pada nilai-nilai tawasuth (moderat), tasamuh (toleran), tawazun (harmonis berimbang), dan i'tidal (lurus-konsisten). Nilai-nilai inilah yang menjadikan umat Islam, terutama para ulamanya, selalu hadir dalam menciptakan kemaslahatan. Allah berfirman,

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ
كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ
لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) ‘umat pertengahan’ agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali

bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyalahkan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.” (QS. Al-Baqarah: 143).

Pemuda dan berbagai segmennya (termasuk warga perorangan, organisasi kemasyarakatan pemuda, dan kelompok sosial bahkan kelompok usaha) perlu bahu-membahu dan bahu-membahu berpartisipasi memantau dan mengawal proses pemilu 2024, bukan hanya sekedar muncul untuk mencoblos nanti di TPS³⁰.

Pendidikan politik Gerakan Pemuda Ansor Jepara dalam pengawasan partisipatif di implementasikan berdasarkan data melalui beberapa kegiatan. *Pertama*, implementasi pendidikan politik melalui sekolah demokrasi. Sekolah demokrasi adalah memberikan pendidikan sejenis seminar untuk memberikan pengetahuan kepada kader-kader GP Ansor Jepara tentang demokrasi. Tujuan sekolah demokrasi adalah untuk mensukseskan pemilu 2024. Sekolah demokrasi ini kegiatannya ditingkat kabupaten dengan mengundang seluruh kader GP Ansor dari tingkat anak cabang. Dalam sekolah demokrasi yang mengisi adalah dari jajaran pimpinan GP Ansor wilayah, dan juga ada dari Bawaslu dan KPU Jepara. Sekolah demokrasi ini akan berlangsung di kecamatan-kecamatan dengan pesertanya kader GP Ansor dari tingkat ranting yang ada di kabupaten Jepara Menurut ketua PC GP Ansor Jepara, kader Ansor harus siap untuk mensukseskan pemilu 2024, baik sebagai pemilih, penyelenggara pemilu, atau peserta pemilu. Kemudian, apapun pilihan kader, baik jadi pemilih, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, atau peserta pemilu, kader Ansor bisa menjadi motor penggerak partisipasi pemilu di wilayahnya masing-masing³¹.

Untuk kegiatan pengawasan partisipatif merupakan salah satu bagian dari kegiatan GP Ansor Jepara dalam rangka tugas di pemilu 2024 dengan memastikan pemilu damai dan sukses. Hal itu menjadi tanggung jawab GP Ansor Jepara. Oleh sebab itu kader diarahkan menjadi penyelenggara pemilu yang memiliki potensi. Selain itu, kader GP Ansor diarahkan untuk mencalonkan diri di pemilu untuk kader yang berani dan mempunyai potensi. Sebagai

³⁰ Rendy Saputra, “Pemuda Dan Pengawasan Partisipatif Pemilu,” *gatra.com*, 2023, <https://www.gatra.com/news-563261-kolom-pemuda-dan-pengawasan-partisipatif-pemilu.html>.

³¹ Hasil wawancara dengan ketua PC GP Ansor Jepara, 2 Januari 2023.

organisasi masyarakat, GP Ansor kegiatannya tidak hanya fokus di pemilu³².

Menurut Nur Hadi & Tutik Alawiyah, Sekolah Demokrasi menggunakan metode *Action Learning* dalam proses pembelajarannya. Seperti sekolah demokrasi yang ada di Pasuruan. Sedangkan, dalam program sekolah demokrasi yang ada di GP Ansor Jepara tidak ada metode dalam pembelajaran yang diberikan. Oleh karena itu, perlu adanya metode dalam sekolah demokrasi agar pendidikan yang diberikan di GP Ansor Jepara lebih baik³³.

Gambar 4.1
Kegiatan sekolah demokrasi



Kedua, Untuk program-program GP Ansor ke tingkat ranting dilakukan setiap 3 kecamatan ada sekolah kader penggerak desa. Sekolah kader penggerak desa adalah sejenis diklat satu hari dari pagi sampai malam. Tujuannya agar dapat menjadi penggerak NU melalui Ansor, sehingga mampu memberikan kontribusi yang kongkrit untuk desa dan nilai manfaat bagi masyarakat pada umumnya. Dalam kegiatan ini, penajaman materi tentang penyelenggaraan dan pengawasan pemilu yang pematannya dari KPU dan Bawaslu Jepara. Selain itu, dalam sekolah demokrasi ada materi tentang APBDES. Tujuannya agar kader-kader siap mengawal dan bermitra dengan pemerintah desa, memahami

³² Hasil wawancara dengan ketua PC GP Ansor Jepara, 2 Januari 2023.

³³ Nur Hadi and Tutik Alawiyah, "Konsep Dan Implementasi Metode Action Learning Di Sekolah Demokrasi Pasuruan 2015," *Al-Murabbi* 1, no. 1 (2016): 163.

implementasi UU Desa, dan tahu cara penyusunan APBDES³⁴. Kegiatan pengkaderan ini diikuti dan di support lebih 60 kader yang berasal dari zona korwil 4 yakni Mayong, Nalumsari, Kalinyamatan, dan Welahan sebagai wujud pemerataan penggerak kader yang siap mengawal dan proaktif dalam pembangunan desa.

Menurut Niken Lestari, Diniyatul Kumala, Lulu Addina Shafa, Muhammad Alif Aristya, Kegiatan sekolah kader penggerak desa dapat meningkatkan pemahaman pemuda tentang pemerintahan desa, menggali potensi desa, dan berpartisipasi dalam pembangunan desa. Begitu pula dengan GP Ansor Jepara yang melaksanakan sekolah kader penggerak desa di tingkat ranting yang akan menambah partisipasi dari organisasi kepemudaan kepada desa³⁵.

Gambar 4.2
Kegiatan sekolah kader penggerak desa



Respon kader sebagai peserta sekolah demokrasi dan sekolah kader penggerak desa menerima kegiatan tersebut dengan baik dan antusias yang luar biasa. Tidak hanya kontribusi di organisasi, kader GP Ansor Jepara diharapkan bisa berkontribusi di masyarakat di dunia politik.

Selain kegiatan pendidikan politik di atas. Dalam mensukseskan pemilu 2024, Bawaslu Jepara memberikan sosialisasi pada GP Ansor Jepara mengenai pemilu dengan mengajak ormas termasuk GP Ansor Jepara agar ikutserta mensukseskan pemilu dengan salah satunya turut serta menjadi pengawas partisipatif. Bawaslu mempertimbangkan keikutsertaan

³⁴ Hasil wawancara dengan ketua PC GP Ansor Jepara, 2 Januari 2023.

³⁵ Niken Lestari et al., "Tingkatkan Pengetahuan Dan Kepedulian Organisasi Gerakan Kepemudaan Dalam Pembangunan Desa Melalui Sekolah Kader Penggerak Desa," *ABDIANDAYA : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, n.d., 47.

karena struktur GP Ansor yang pesat dan GP Ansor ini memiliki 16 kepengurusan di kecamatan dan 230 ranting di seluruh desa/kelurahan di kabupaten Jepara. Selain itu, Bawaslu mengajak bertemu dan bekerjasama. Apabila ada kegiatan yang melibatkan ormas, PC GP Ansor Jepara di undang untuk hadir. Bawaslu juga hadir sebagai pemateri dalam kegiatan-kegiatan GP Ansor Jepara seperti sekolah kader penggerak desa yang dijelaskan sebelumnya. Bawaslu menggandeng GP Ansor karena sosialisasi pengawasan partisipatif agar dikalangan masyarakat mengetahui bahwa pemilu tidak hanya tanggungjawab penyelenggara pemilu tetapi peran masyarakat juga di perlukan termasuk ormas³⁶.

Program pengawasan partisipatif yang diwujudkan Bawaslu kabupaten Jepara melalui organisasi masyarakat yang salah satunya GP Ansor. Dalam perwujudan program pengawasan partisipatif dengan memberikan pendidikan tentang cara mengawasi. Pendidikan yang diberikan Bawaslu Jepara tidak hanya kepada GP Ansor, namun untuk seluruh elemen OKP/ormas lain yang dilibatkan agar mendapatkan binaan atau materi tentang pengawasan partisipatif. Namun, untuk pelaksanaan di lapangan disesuaikan dengan masing-masing ormas. Bawaslu hanya membekali dengan dalam melakukan pengawasan partisipatif seperti apa saat di lapangan dan apa yang harus diawasi, itulah yang menjadi titik poin dalam pendidikan tentang pengawasan partisipatif. Kemudian, Bawaslu juga membekali bagaimana cara mengawasi dan cara melapor dengan dibekali dari sisi teori³⁷.

Kemudian, menurut Ratnia Solihah, Arry Bainus dan Iding Rosyidin, Salah satu tantangan yang terkait dengan pengawasan partisipatif adalah meningkatkan kemauan masyarakat untuk melaporkan setiap pelanggaran atau praktik kecurangan yang ditemui. Ini tentu kerja keras Bawaslu mensosialisasikan adanya salah satu kewajiban sosial mengawal setiap tahapan pemilu, bukan hanya kewajiban ikut pemilu politik. Begitu pula sosialisasi yang diberikan Bawaslu Jepara kepada organisasi seperti GP Ansor dalam pengawasan partisipatif tentang bagaimana cara mengawasi karena mengawasi bagian dari semua lapisan masyarakat³⁸.

Pengawasan partisipatif merupakan salah satu bagian dari kegiatan cabang GP Ansor dalam rangka tugas di pemilu 2024

³⁶ Hasil wawancara dengan Ketua Bawaslu Jepara, 16 Januari 2023.

³⁷ Hasil wawancara dengan ketua Bawaslu Jepara, 16 Januari 2023.

³⁸ Solihah, Bainus, and Rosyidin, "Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Berintegritas Dan Demokratis," 25.

untuk memastikan pemilu damai dan sukses karena kegiatan tersebut menjadi tanggungjawab GP Ansor dalam mensukseskan pemilu yang baik. Meskipun kegiatan GP Ansor Jepara tidak hanya tentang program pemilu³⁹.

Sosialisasi pengawasan partisipatif yang diwujudkan Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu yang bersih dan bermartabat melalui ormas dengan pendidikan dan pemahaman kepada masyarakat yang menjadi bagian dari ikhtiar. Mengenai hasilnya tergantung masyarakat dan sampai saat ini belum melihat hasilnya. Berdasarkan hasil di tahun 2019 target belum terpenuhi 100%. Hal ini disebabkan karena masyarakat belum bisa sepenuhnya memberikan dukungan sepenuhnya kepada Bawaslu dalam pengawasan partisipatif⁴⁰.

Menurut Edy Kurniawansyah, Bagdawansyah Alqadri, pelaksanaan pengawasan pemilu yang demokratis tidak hanya dilakukan oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu). Pemilu yang demokratis perlu memainkan peran partisipasi masyarakat dalam semua tahapan proses pemilu, termasuk peran partisipasi publik dalam mengawasi pelaksanaan pemilu itu sendiri. Begitu pula yang dilakukan Bawaslu Jepara dalam melakukan sosialisasi. Agar dapat terlaksana dengan baik sosialisasi diberikan kepada organisasi masyarakat, kemudian organisasi masyarakat seperti GP Ansor mensosialisasikan Kembali kepada masyarakat untuk menciptakan pemilu yang demokratis⁴¹.

Pendidikan tentang pengawasan partisipatif ini ketua PC GP Ansor Jepara berharap agar SKPP di Bawaslu ini ada di tingkatan kecamatan karena saat ini SKPP hanya ada di tingkat kabupaten. Apabila SKPP dapat turun sampai kecamatan bisa mengkonsolidir kader-kader GP Ansor untuk diberikan materi tentang pengawasan partisipatif. Hal ini bertujuan agar pendidikan ini dapat di sampaikan ilmunya kepada kader-kader yang ada di tingkat anak cabang ataupun ranting. Jika kader sudah mengetahui pikiran mereka akan bergerak sesuai dengan bangunan pikiran mereka⁴².

Menurut Nia Sofiyatul Millah & Dinie Anggraenie Dewi, Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu memiliki keterbatasan dalam memantau seluruh tahapan pemilu atau pilkada, sehingga

³⁹ Hasil wawancara dengan Ketua PC GP Ansor Jepara, 2 Januari 2023

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Ketua Bawaslu Jepara, 16 Januari 2023.

⁴¹ Edy Kurniawansyah and Bagdawansyah Alqadri, "Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula Pada Pilkada Di Kabupaten Sumbawa," *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 4, no. 2 (2021): 288.

⁴² Hasil wawancara dengan Ketua PC GP Ansor Jepara, 2 Januari 2023.

Bawaslu memiliki beberapa program unggulan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu yang salah satunya SKPP. Kemudian, SKPP di Kabupaten Jepara tidak sampai ke tingkat kecamatan karena ada keterbatasan. Oleh sebab itu, kader GP Ansor Jepara yang ingin mengikuti dapat mendaftar SKPP yang ada di tingkat kabupaten⁴³.

Pemuda sebagai pemantau pemilu dalam organisasi masyarakat dan kepemudaan salah satunya adalah Gerakan Pemuda (GP) Ansor. Gerakan Pemuda Ansor Jepara adalah salah satu organisasi kepemudaan yang berperan aktif di pemilu. Berdasarkan hasil penelitian, ketua PC GP Ansor Jepara mendorong seluruh kader untuk terlibat dalam proses gelaran pemilu. Jika kader ada yang bersedia menjadi penyelenggara pemilu akan didorong agar menjadi penyelenggara. Kemudian, jika ada kader yang ingin menjadi caleg (calon legislatif) akan didorong menjadi caleg⁴⁴.

Dalam pengawasan partisipatif, kader-kader GP Ansor didorong untuk terlibat karena pemilu tidak hanya diserahkan kepada penyelenggara pemilu, melainkan butuh peran serta masyarakat. Untuk itu mendorong kader-kader untuk mengajak masyarakat agar ikut serta datang ke TPS. Minimal dengan kader-kader mengajak, mensosialisasi bahwa pemilu itu gawe-gawe negara yang sah untuk mengganti pemerintahan yang baru. Untuk belajar pengawasan partisipatif terdapat di sekolah kader penggerak desa. Namun pada prakteknya, kader GP Ansor ada yang menjadi RT, Kepala desa. Ada puluhan kader dari GP Ansor Jepara yang menjadi kepala desa. Adanya pengawasan partisipatif gunanya untuk mensukseskan pemilu yang dilakukan dengan sukarela oleh kelompok masyarakat termasuk di dalamnya ada GP Ansor, fatayat, IPNU, dan lain-lain⁴⁵.

Menurut Yusa Djuyandi, Mohamad Firdaus, dan Arief Hidayat, dalam konteks kelembagaan pemantauan pemilu, pemetaan kedua jaringan ormas seperti NU dan Muhammadiyah tersebut perlu dikaji lebih lanjut. Dengan semakin banyaknya kader kedua asosiasi ini yang terlibat dalam penyelenggara pemilu, maka dapat dikatakan bahwa mereka kini memiliki peran strategis yang semakin besar, tidak hanya dalam bidang

⁴³ Nia Sofiyatul Millah and Dinie Anggraenie Dewi, "Skpp Bawaslu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara," *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 361, <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1583>.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Ketua PC GP Ansor Jepara, 2 Januari 2023.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Ketua PC GP Ansor Jepara, 2 Januari 2023.

keagamaan, sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, tetapi juga dalam bidang politik. Begitu pula GP Ansor Jepara yang tidak hanya fokus pada keagamaan, sosial, ekonomi, namun juga di politik⁴⁶.

Karena kader GP Ansor Jepara yang banyak, partisipasi di pemilu ada kader yang memosisikan diri sebagai penyelenggara pemilu. Dari beberapa kader mencalonkan diri sebagai penyelenggara pemilu ada dari tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Selain itu, ada kader yang kosentrasi di partai tertentu atau menjadi caleg. Tujuan dari kader yang ikut berpartisipasi di penyelenggara, partai ataupun caleg ini untuk mensukseskan pemilu. Meskipun untuk mensukseskan dirinya, sebenarnya kader-kader yang terlibat digelaran pemilu itu memiliki peranan mensukseskan pemilu. Pemilu dapat dikatakan sukses harus kondusif dan tingkat partisipasi meningkat⁴⁷.

Kader dari GP Ansor Jepara juga ada yang di JPPR. JPPR atau Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat adalah jaringan yang terdiri dari 38 lembaga yang meliputi organisasi sosial yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, LSM, Lembaga pendidikan, organisasi lintas agama, organisasi mahasiswa dan stasiun radio. Adanya program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memantau setiap tahapan pemilu melalui pemanfaatan teknologi informasi seperti SMS, telepon. Kemudian, media sosial, seperti facebook, twitter. Salah satu Koordinator JPPR merupakan kader GP Ansor yaitu wakil ketua PC GP Ansor Jepara. JPPR ini menjadi lembaga pemantau pemilu agar pemilu berjalan dengan baik. Di Indonesia ada JPPR internasional, di provinsi, dan di kabupaten. Di Jepara ada 9 orang yang bergabung di JPPR, 4 dari 9 orang tersebut adalah kader GP Ansor Jepara, termasuk koordinatornya yaitu Lukman Hakim wakil ketua PC GP Ansor Jepara. Beliau di JPPR menjadi koordinator sebagai pemantau independent, seperti pemantau di TPS. Sebenarnya, GP Ansor terkait dengan pemilu terlibat di semua lingkup. Ada yang menjadi pemantau ataupun penyelenggara pemilu. Kaitannya dengan pengawasan partisipatif, kader GP Ansor didorong untuk menjadi pengawas partisipatif. Caranya dengan mengajak masyarakat berpartisipasi,

⁴⁶ Yusa Djuyandi, Mohamad Firdaus, and Arief Hidayat, "Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengisian Jabatan Badan Pengawas Pemilu Yogyakarta: Studi Pada Peran Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah," *Jurnal Wacana Politik* 3, no. 2 (2018): 109.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Ketua PC GP Ansor Jepara, 2 januari 2023.

melaporkan terjadinya penyelenggaraan, melakukan koordinasi, namun penindaknya tetap penyelenggara, yaitu KPU dan Bawaslu.

GP Ansor Jepara berperan dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu tentu mendorong seluruh kader-kader agar ikutserta dalam menjadi penyelenggara pemilu seperti yang dijelaskan sebelumnya. Pengurus GP Ansor Jepara menginstruksikan agar kader GP Ansor yang tertarik menjadi penyelenggara untuk ikutserta menjadi penyelenggara pemilu. Harapannya saat mereka melaksanakan tugas penyelenggaraan ini juga turut serta melakukan perbaikan dalam pelaksanaan pemilu. Pendidikan pemilu kepada kader juga diberikan ditingkatkan kecamatan dan desa, di GP Ansor itu koordinator wilayah atau korwil. Pendidikan pemilu atau juga demokrasi yang dilakukan GP Ansor ke kader-kader dengan bekerjasama KPU dan Bawaslu. Jadi, dalam pendidikan pemilu narasumbernya dari KPU dan Bawaslu. Kemudian, pesertanya dari kader-kader GP Ansor. Harapannya kader-kader GP Ansor bisa memiliki ilmu pengetahuan tentang kepemiluan, sehingga bisa ditularkan kepada masyarakat yang ada di sekitar mereka.

Bentuk pendidikan untuk GP Ansor salah satunya adalah dengan sosialisasi dari Bawaslu seperti yang dijelaskan sebelumnya. Bawaslu Jepara dan PC GP Ansor Jepara bekerjasama tentang peran dan partisipasi organisasi kepemudaan GP Ansor. Secara umum, Bawaslu Jepara dan PC GP Ansor Jepara menjalin Kerjasama karena basisnya komunitas/ormas. Di ormas sendiri Bawaslu menjalin Kerjasama dengan dua organisasi yaitu GP Ansor dan Pemuda Muhammadiyah. Mengenai keterlibatan kader GP Ansor dalam melakukan pengawasan partisipatif ikutserta berperan aktif dalam pengawasan itu. Tetapi tidak semua GP Ansor punya kewajiban yang sama untuk ikutserta mensukseskan pemilu dengan melalui pengawasan partisipatif. Untuk Kerjasama Bawaslu dan GP Ansor terdapat MOU tentang sosialisasi dan peran pengawasan partisipatif pemilihan umum. Tujuan dan maksud dari kerjasama Bawaslu dan GP Ansor Jepara, yaitu:

- a. Meningkatkan peran dan partisipasi organisasi kepemudaan keagamaan di wilayah kabupaten Jepara untuk ikut memberikan kontribusi dan sumbangan dalam perbaikan pelaksanaan pemilu
- b. Wujud dari program pengawasan partisipatif dari kalangan kepemudaan keagamaan di wilayah kabupaten Jepara.

- c. Tercapainya sosialisasi pengawasan partisipatif pemilu melalui pertemuan keagamaan di wilayah kabupaten Jepara.
- d. Mewujudkan pelaksanaan pemilu yang bersih dan bermartabat melalui Sosialisasi dan pengawasan partisipatif pemilu melalui organisasi kepemudaan keagamaan di wilayah kabupaten Jepara.

Gambar 4.3
PC GP Ansor Jepara & Bawaslu Jepara teken kerjasama bidang pengawasan partisipatif



Pada prinsipnya, dalam mewujudkan program pengawasan partisipatif di wilayah kabupaten Jepara PC GP Ansor Jepara menyampaikan kepada kader agar menjadi pengawas partisipatif. Bagi kader yang tidak menjadi penyelenggara pemilu, dan yang tidak menjadi peserta pemilu ini diharapkan menjadi pengawas partisipatif dengan cara sering koordinasi dengan penyelenggara pemilu ketika ada masalah di kepiluan bisa dilaporkan. Minimal yang dilakukan dengan adanya penyelenggara pemilu yang berasal dari kader-kader GP Ansor Jepara.

2. Analisis Data Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Pendidikan Politik Gerakan Pemuda Ansor Jepara Dalam Pengawasan Partisipatif Di Pemilu 2024

Dalam melakukan analisis faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi pendidikan politik Gerakan Pemuda Ansor Jepara dalam pengawasan partisipatif di pemilu 2024, menggunakan pendekatan berupa analisis SWOT, yaitu:

a) Faktor Internal

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa faktor internal implementasi pendidikan politik Gerakan Pemuda

Ansor Jepara dalam pengawasan partisipatif di pemilu 2024, yaitu:

- a. Strength (Kekuatan)
 - Banyaknya kader yang banyak sampai ke pengurus tingkat ranting di seluruh kabupaten Jepara
 - sumber daya manusianya banyak
 - Para kader memperoleh pendidikan politik dalam pengawasan partisipatif di pemilu
- b. Weakness (Kelemahan)
 - Selama ini kader GP Ansor kosentrasi di sosial kemasyarakatan dan keagamaan
 - Banyak dari kader yang belum memahami tentang konsep pengawasan partisipatif

b) Faktor Eksternal

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa faktor eksternal implementasi pendidikan politik Gerakan Pemuda Ansor Jepara dalam pengawasan partisipatif di pemilu 2024, yaitu:

- a. Opportunity (Peluang)
 - Pemateri dalam pendidikan politik dari KPU dan Bawaslu
 - Banyak kader yang mumpuni pada bidang politik
- b. Threats (Ancaman)
 - Tidak samanya bangunan pikiran kader GP Ansor. Kader-kader GP Ansor yang dari bermacam-macam kalangan karena organisasi ini multi anggota yang kadernya terdiri dari kalangan pesantren, SMA, tidak sekolah, dan punya pekerjaan yang menyebabkan transformasi ilmu pengetahuan tidak sama.

Adapun tabel analisis SWOT faktor internal dan eksternal implementasi pendidikan politik Gerakan Pemuda Ansor Jepara dalam pengawasan partisipatif di pemilu 2024, antara lain:

Tabel 4.10
Tabel analisis SWOT

Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
<ul style="list-style-type: none"> - Banyaknya kader yang banyak sampai ke pengurus tingkat ranting di seluruh kabupaten Jepara - Sumber daya 	<ul style="list-style-type: none"> - Selama ini kader GP Ansor kosentrasi di sosial kemasyarakatan dan keagamaan - Banyak dari kader yang belum memahami

<p>manusianya banyak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para kader memperoleh pendidikan politik dalam pengawasan partisipatif di pemilu 	<p>tentang konsep pengawasan partisipatif</p>
<p>Peluang (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemateri dalam pendidikan politik dari KPU dan Bawaslu - Banyak kader yang mumpuni pada bidang politik 	<p>Ancaman (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak samanya bangunan pikiran kader GP Ansor. Kader-kader GP Ansor yang dari bermacam-macam kalangan karena organisasi ini multi anggota yang kadernya terdiri dari kalangan pesantren, SMA, tidak sekolah, dan punya pekerjaan yang menyebabkan transformasi ilmu pengetahuan tidak sama.

Setelah di ketahui hasil analisis dari data di atas berdasarkan klasifikasi SWOT maka dapat digambarkan strategi yang akan digunakan meningkatkan faktor-faktor pendukung:

1. Strategi Strengths-Opportunity
 - a. Kader memperoleh pendidikan politik dalam pengawasan partisipatif di pemilu dengan pemateri dalam pendidikan politik dari KPU dan Bawaslu.
 - b. Banyaknya kader yang banyak sampai ke pengurus tingkat ranting di seluruh kabupaten Jepara sehingga banyak kader yang mumpuni pada bidang politik
2. Strategi strengths-Threats
 - a. Para kader memperoleh pendidikan politik dalam pengawasan partisipatif di pemilu dapat mengurangi ancaman tidak samanya bangunan pikiran kader GP Ansor. Kader-kader GP Ansor yang dari bermacam-macam kalangan karena organisasi ini multi anggota yang kadernya terdiri dari kalangan pesantren, SMA, tidak sekolah, dan punya pekerjaan yang menyebabkan transformasi ilmu pengetahuan tidak sama, karena sumber daya manusianya banyak.

3. Strategi weakness-opportunity
 - a. Selama ini kader GP Ansor kosentrasi di sosial kemasyarakatan dan keagamaan, namun memiliki peluang karena banyak kader yang mumpuni pada bidang politik
 - b. Banyak dari kader yang belum memahami tentang konsep pengawasan partisipatif. Maka berpeluang dengan mendapat pemateri dalam pendidikan politik dari KPU dan Bawaslu
4. Strategi weakness-threats
 - a. Mengurangi kader GP Ansor kosentrasi di sosial kemasyarakatan dan keagamaan dan kader yang belum memahami tentang konsep pengawasan partisipatif dapat memperkecil ancaman tidak samanya bangunan pikiran kader GP Ansor. Kader-kader GP Ansor yang dari bermacam-macam kalangan karena organisasi ini multi anggota yang kadernya terdiri dari kalangan pesantren, SMA, tidak sekolah, dan punya pekerjaan yang menyebabkan transformasi ilmu pengetahuan tidak sama.

